



# LAPORAN KINERJA (LKJ) DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET TAHUN 2017



## KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keseriusan pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Laporan kinerja ini sekaligus juga merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dilaporkan dan dimonitor melalui Sistem Monitoring Capaian Kinerja (*simonja.intranet*) secara triwulanan. Pada dasarnya, laporan ini memuat hasil dan capaian kontrak kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun anggaran 2017.

Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberikan manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan Sekretariat Kabinet pada umumnya dan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada khususnya. Selain itu, ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet,



**Yuli Harsono**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2017 dalam mencapai Sasaran Program “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas”. Sasaran Program tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang capaian kinerjanya dapat dilihat dari persentase kepuasan yang diperoleh dari setiap kegiatan serta disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet dengan tingkat kepuasan sebesar 85% dan masuk dalam kategori “Sangat Baik” atau mencapai nilai “A”;
2. Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan tingkat kepuasan sebesar 100% dan masuk dalam kategori “Sangat Baik” atau mencapai nilai “A”;
3. Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah dengan tingkat kepuasan sebesar 81% dan masuk dalam kategori “Baik” atau mencapai nilai “B”;
4. Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan dengan tingkat kepuasan sebesar 77% dan masuk dalam kategori “Baik” atau mencapai nilai “B”;
5. Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan dengan tingkat kepuasan sebesar 90% dan masuk dalam kategori “Sangat Baik” atau mencapai nilai “A”.

Tidak semua Indikator Utama Kinerja tahun 2017 dapat dibandingkan capaian kinerjanya dengan capaian kinerja tahun 2016. Indikator Kinerja Utama 2 (dua) yaitu persentase penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan Indikator Kinerja Utama 3 (tiga) yaitu persentase kepuasan peserta Diklat Fungsional Penerjemah merupakan Indikator Kinerja Utama baru di tahun 2017 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2016. Sedangkan Indikator Kinerja Utama lainnya yaitu persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan

Sidang Kabinet, persentase kepuasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan dan persentase kepuasan layanan keprotokolan dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, capaian kinerja ketiga Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, pilihan jawaban pada kuesioner survei menggunakan skala likert sehingga jawaban responden menjadi lebih bervariasi.

Guna mewujudkan tercapainya Sasaran Program tersebut, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet selalu berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya, antara lain melalui:

- a. Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus dengan *stakeholders* baik internal maupun eksternal Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, yakni unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, maupun kementerian/lembaga terkait lainnya sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet.
- b. Meningkatkan kualitas dokumen hasil-hasil Sidang Kabinet terutama Arahan Presiden (APRES) dan Risalah Sidang Kabinet sebagai bahan acuan bagi kementerian/lembaga dalam pengambilan kebijakan.
- c. Meningkatkan kualitas Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disiapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk disahkan Presiden, serta kualitas pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.
- d. Meningkatkan kualitas dan kecepatan penyajian informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet melalui *website* setkab.go.id dan media sosial Sekretariat Kabinet lainnya serta meningkatkan kualitas keprotokolan Sekretaris Kabinet.

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Program tersebut, didukung oleh anggaran yang dialokasikan melalui kegiatan pada 4 (empat) Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dengan Program Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, meliputi:

1. Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-bahan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,-
2. Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,-
3. Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan, dengan nilai sebesar Rp3.000.000.000,-
4. Dukungan Hubungan Kemasyarakatan serta Koordinasi dan Penyiapan Keprotokolan Rapat, Pertemuan, atau Kegiatan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta Koordinasi Pelaksanaan Keprotokolan Rapat dan/atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden, dengan nilai sebesar Rp3.000.000.000,-

Jadi total anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2017 adalah sebesar Rp 12.000.000.000,-. Setelah dilakukan evaluasi anggaran secara berkala, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet merasakan perlu melakukan revisi anggaran karena semakin banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, sehingga alokasi anggaran hasil revisi sebesar Rp 14.329.061.000,-

# DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang.....	1
B Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet .....	1
C Struktur Organisasi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet .....	2
D Sumber Daya Manusia pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet .....	4
E Potensi dan Permasalahan Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	6
F Sistematika Penyajian Laporan.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019.....	9
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 (Sasaran Program: “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas”) .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 (Sasaran Strategis: “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas”) .....	15
B Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 .....	16
C Realisasi Anggaran.....	28
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A Kesimpulan .....	30
B Saran .....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Kedepujian Bidang Dukungan Kerja Kabinet Periode Tahun 2015-2019 .....	12
Tabel 2.2. Kebutuhan Pendanaan Kedepujian Bidang Dukungan Kerja Kabinet Periode Tahun 2015 – 2019.....	13
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Periode Tahun 2015 – 2019.....	14
Tabel 3.1. Rentang Capaian Kinerja .....	15
Tabel 3.2. Realisasi, Capaian dan Kategori dari Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 .....	16
Tabel 3.3. Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2017 .....	16
Tabel 3.4. Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet Tahun 2017	20
Tabel 3.5. Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah Tahun 2017 .....	23
Tabel 3.6. Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan Tahun 2017 .....	27
Tabel 3.7. Rincian Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 .....	29
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2016 dan Tahun 2017 .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin .....	4
Grafik 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan .....	5
Grafik 1.3. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan/Eselon .....	5
Grafik 1.4. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan .....	5
Grafik 3.1. Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet .....	18
Grafik 3.2. Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet .....	21
Grafik 3.3. Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah Tahun 2017 .....	22
Grafik 3.4. Jumlah Responden Survei Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan Tahun 2017 .....	25
Grafik 3.5. Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan Tahun 2017 .....	25
Grafik 3.6. Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan Tahun 2017 .....	28

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet terdiri dari LKj interim dan LKj tahunan. LKj interim dilaporkan melalui aplikasi *simonja.intranet* dan *sikt.intranet*, capaian kinerja beserta data dukung dan realisasi anggaran, per triwulan diinput dan dimonitor secara elektronik, sedangkan LKj tahunan disusun pada akhir tahun dan disampaikan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet untuk dilakukan reviu (penilaian) oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet.

LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 disusun guna melaporkan tindak lanjut rekomendasi LKj tahun sebelumnya dan melihat progres capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang targetnya telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017.

LKj ini juga memuat gambaran tingkat capaian PK Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2017, tindak lanjut, dan rekomendasi di dalam LKj tahun sebelumnya, serta kendala maupun permasalahan yang dihadapi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet selama kurun waktu satu tahun yakni tahun 2017.

### B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet *jo.* Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet yang dipimpin oleh Deputy.

Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
- e. Pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
- f. Penyelenggaraan dan koordinasi hubungan kemasyarakatan, serta pelayanan dan dukungan keprotokolan Sekretariat Kabinet; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

### **C. Struktur Organisasi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, struktur organisasi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet terdiri dari :

#### **1. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan**

- a. Bidang Perencanaan Persidangan
  - 1) Subbidang Agenda Persidangan
  - 2) Subbidang Pelaksanaan Persidangan
- b. Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan
  - 1) Subbidang Perlengkapan Persidangan
  - 2) Subbidang Persiapan Persidangan
- c. Bidang Penyiapan Bahan Persidangan
  - 1) Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  - 2) Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

#### **2. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan**

- a. Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan
  - 1) Subbidang Perekaman Audio dan Visual Persidangan
  - 2) Subbidang Transkripsi Persidangan
- b. Bidang Risalah Persidangan
  - 1) Subbidang Penyusunan Risalah Persidangan
  - 2) Subbidang Pengelolaan Risalah Persidangan

- 3) Subbidang Distribusi Risalah Persidangan
- c. Bidang Fasilitas Operasional
  - 1) Subbidang Program dan Anggaran
  - 2) Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 3. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan**
  - a. Bidang Naskah
    - 1) Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan
    - 2) Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing
    - 3) Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia
  - b. Bidang Penerjemahan
    - 1) Subbidang Penerjemahan I
    - 2) Subbidang Penerjemahan II
    - 3) Subbidang Dukungan Fasilitas Penerjemahan dan Dokumentasi
  - c. Bidang Verbatim
    - 1) Subbidang Verbatim I
    - 2) Subbidang Verbatim II
    - 3) Subbidang Dukungan Data
  - d. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah
    - 1) Subbidang Pembinaan dan Akreditasi
    - 2) Subbidang Penilaian Kinerja dan Jabatan
    - 3) Subbidang Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan
- 4. Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol**
  - a. Bidang Pengelolaan Informasi
    - 1) Subbidang Data dan Informasi
    - 2) Subbidang Pemantauan Informasi
  - b. Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi
    - 1) Subbidang Pelayanan Informasi
    - 2) Subbidang Diseminasi Informasi
  - c. Bidang Protokol
    - 1) Subbidang Protokol
    - 2) Subbidang Acara
    - 3) Subbidang Penghubung

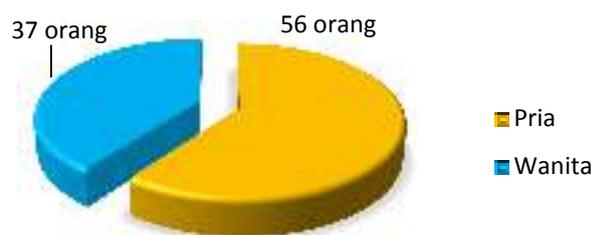


#### D. Sumber Daya Manusia pada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet didukung oleh jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai, tersebar di 4 (empat) Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, seluruhnya berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang.

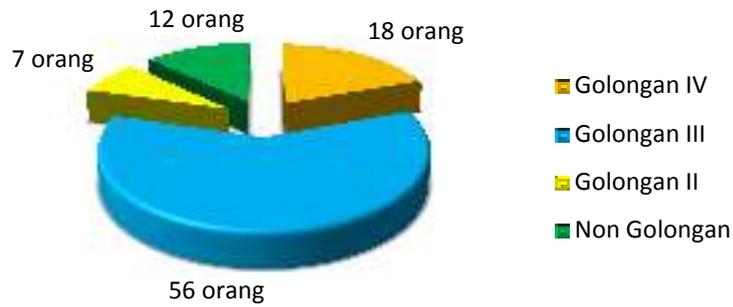
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagai berikut:

##### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin



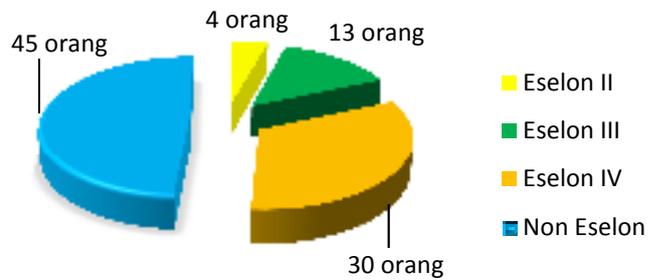
**Grafik 1.1.** Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

## 2. Berdasarkan Golongan



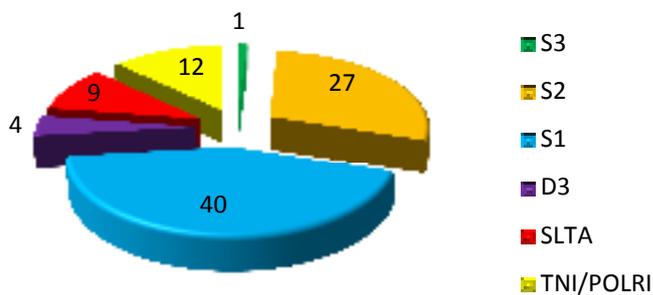
Grafik 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

## 3. Berdasarkan Jabatan/Eselon



Grafik 1.3. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan/Eselon

## 4. Berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.4. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan

## **E. Potensi dan Permasalahan Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.**

Analisis internal bertujuan untuk mengetahui potensi maupun kelemahan atau permasalahan strategis sehingga dapat menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam organisasi. Hasil analisis tersebut bersama dengan arahan strategi organisasi digunakan untuk menetapkan sasaran, perumusan strategi, dan implementasinya.

### **1. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.**

Untuk mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis yang menganalisis organisasi mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

### **2. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).**

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan Analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dalam menetapkan dan mencapai tujuan serta sasaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **1. Kekuatan (*Strengths*)**

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi unit organisasi yang profesional dan handal, yaitu :

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- c. Jumlah SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- d. Kesempatan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana untuk kepentingan pengembangan SDM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet; dan
- e. Tersedianya dokumen hasil-hasil sidang kabinet, rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mendukung penelaahan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden.

#### **2. Kelemahan (*Weaknesses*)**

Di samping potensi-potensi yang dimiliki yang menjadikan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menjadi unit organisasi yang profesional dan andal, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet perlu mewaspadaikan kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada

untuk segera melakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu sidang kabinet yang masih di luar kontrol Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- b. Peningkatan kemampuan dan penempatan SDM belum sesuai kebutuhan organisasi;
- c. Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara optimal;
- d. Sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai kebutuhan;
- e. Sistem Informasi Sidang Kabinet belum sepenuhnya dikembangkan; dan
- f. Anggaran dan SDM yang tersedia perlu ditingkatkan agar pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemahan dapat lebih optimal.

### **3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)**

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berkembang. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- c. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- d. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik; dan
- e. Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan unit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan kementerian/lembaga lainnya, serta pihak lain di luar pemerintahan seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

### **4. Ancaman Organisasi (*Threats*)**

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan unit organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman terhadap unit organisasi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;

- b. Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara; dan
- c. Pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

#### **F. Sistematika Penyajian Laporan.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

**Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran singkat Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017.

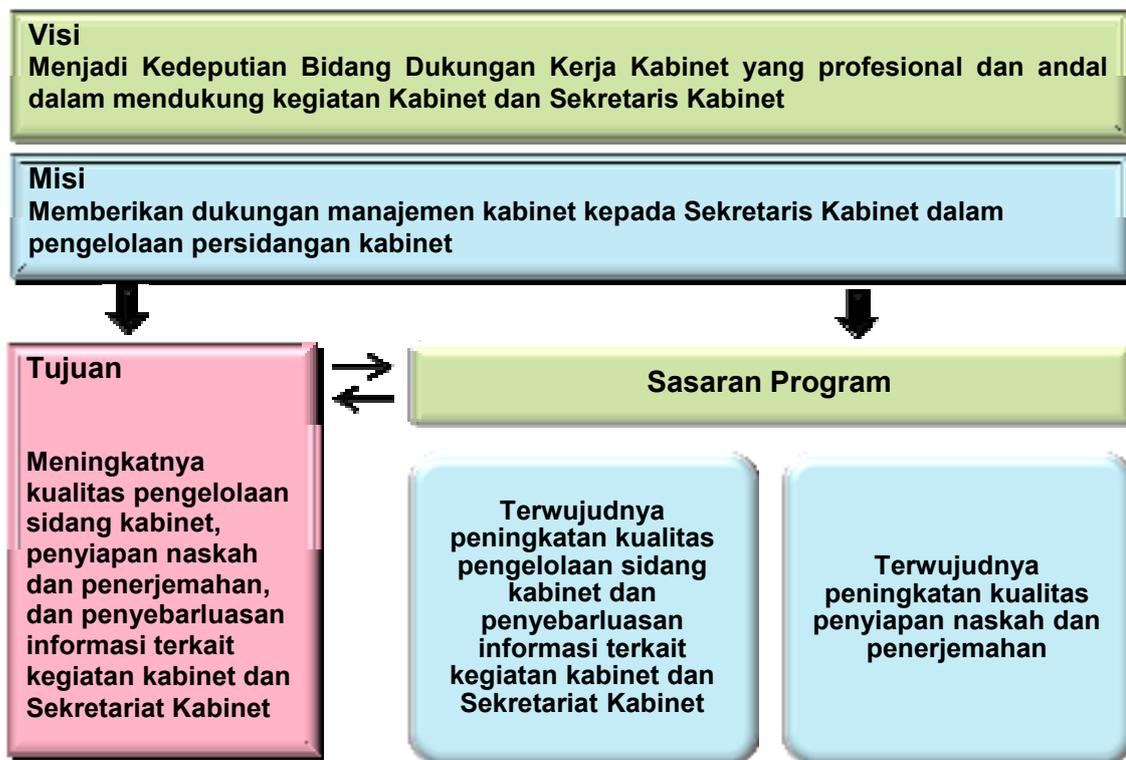
**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, memuat hasil pengukuran kinerja, analisis disertai dengan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2017.

**Bab IV Penutup**, berisi kesimpulan menyeluruh dari LKj Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 merupakan dokumen yang dijadikan pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing agar dapat terselenggara dengan baik sehingga pencapaian kinerja dapat diukur. Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 menjelaskan secara ringkas mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran program dari Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.



Pencapaian tujuan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet diukur melalui 5 (lima) indikator tujuan dengan target sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dengan target 100%
2. Meningkatnya kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet dengan target 100%
3. Meningkatnya kualitas naskah dan penerjemah dokumen kepresidenan/kenegaraan yang ditindaklanjuti dengan target 100%

4. Meningkatnya pejabat fungsional penerjemah yang dibina sesuai rencana dengan target 100%
5. Meningkatnya kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet dengan target 100%

Selain penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dari Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang menjadi pedoman dalam melaksanakan peran sebagai pendukung manajemen kabinet, di dalam Rencana Strategis juga dijelaskan secara ringkas mengenai Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Arah Kebijakan dan Strategi yang tepat dapat mempengaruhi kejelasan dari tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet, sehingga akan mempengaruhi pengukuran kinerja dari Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet. **Arah Kebijakan** Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu :

1. Optimalisasi pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet.

Optimalisasi pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan, sangat dipengaruhi oleh kejelasan lingkup tugas dan fungsi serta struktur organisasi untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut. Penataan tugas dan fungsi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam mengoptimalkan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet. Penataan tugas dan fungsi organisasi berupa penajaman tugas dan fungsi, peneraan ulang beban tugas, dan penyesuaian struktur yang mewadahnya, akan mengoptimalkan kinerja antarunit.

2. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif

Kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif sangat menunjang bagi terciptanya budaya kerja dalam rangka peningkatan kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas organisasi perlu dilaksanakan pula dengan memperhatikan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang efektif dilakukan dengan menyempurnakan prosedur kerja internal serta memperjelas dan meningkatkan kualitas keterhubungan antara prosedur internal unit kerja di lingkup Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet dengan prosedur yang dimiliki oleh para *stakeholders* Sekretariat Kabinet di bidang persidangan Kabinet.

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Sekretaris Kabinet dalam memperoleh dukungan administrasi mengenai pelaksanaan dan dokumen

persidangan yang berkualitas dan terfokus kepada prioritas pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan pembangunan jangka panjang. Di samping itu, peningkatan kompetensi juga untuk menyesuaikan keterampilan SDM dengan perkembangan teknologi dan metode pelaksanaan pekerjaan yang dikembangkan pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendukung administratif pelaksanaan persidangan. Untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan terutama di bidang keprotokolan, pelatihan penyusunan laporan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan kemampuan berbahasa Inggris.

Dalam rangka pelaksanaan ketiga arah kebijakan tersebut, perlu dirumuskan **strategi** guna pencapaian tujuan dan sasaran Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet, yang difokuskan kepada 3 (tiga) aspek manajemen organisasi yang memerlukan prioritas penanganan, sebagai berikut :

1. Aspek Kelembagaan

Berdasarkan arah kebijakan pertama, pada awal periode 2015-2019 perlu diselesaikan penataan kembali tugas fungsi dan struktur organisasi dengan prinsip bagi habis tugas dalam rangka pemberian dukungan kebijakan dengan *monitoring* dan evaluasi yang ketat perlu dilakukan dari waktu ke waktu.

2. Aspek Tata Laksana

Seiring dengan langkah penataan kelembagaan di atas, dilakukan penyempurnaan prosedur kerja dengan melakukan evaluasi prosedur kerja yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penambahan dan penyempurnaan prosedur kerja dalam rangka pemberian dukungan kebijakan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan kerja.

3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Perlu dilakukan *assessment* secara komprehensif terkait kebutuhan pendidikan dan pelatihan (diklat) SDM dan disusun perencanaan diklat dalam periode 2015-2019. Berdasarkan hasil *assessment* kebutuhan diklat dan penataan kelembagaan di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet, dilakukan evaluasi kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkannya target kinerja dan alokasi pendanaan atas kinerja yang dilakukan. Target kinerja berpedoman kepada kelima indikator kinerja dari Deputi Bidang Dukungan Kinerja Kabinet yang secara rinci dijelaskan pada tabel 2.1. dibawah ini :

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target**  
**Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet**  
**Periode Tahun 2015-2019**

No.	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang berkualitas	Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan	80%	80%	100%	100%	100%
		Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Kebutuhan Pendanaan**  
**Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet**  
**Periode Tahun 2015-2019**

*(dalam juta rupiah)*

No	Kegiatan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden	5.595,7	3.884,5	4.238,5	4.450,4	4.672,9
2.	Dukungan pelaporan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden	1.112,1	2.044,5	2.254,1	2.368,8	2.485,2
3.	Dukungan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	574.542	2.611	2.787,6	3.002,5	3.173,7
4.	Dukungan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan protokol rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	2.814,5	4.162,1	5.084,9	5.339,1	5.606,1

**B. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 (Sasaran Program: “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas”)**

Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Kabinet untuk dilaksanakan oleh Deputy Dukungan Kerja Kabinet yang disertai dengan indikator kinerja serta alokasi anggaran atas setiap jenis indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Deputy Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 juga merupakan tekad tahunan atas target pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Deputy Dukungan Kerja Kabinet.

PK Deputy Dukungan Kerja Kabinet memiliki 1 (satu) sasaran program dan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3.**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet**  
**Periode Tahun 2017**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	100%
		Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	100%
		Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan	100%
		Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	100%

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program yang telah ditetapkan, alokasi anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebesar Rp 4.000.000.000,00.
2. Dukungan pelaporan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebesar Rp 2.000.000.000,00.
3. Dukungan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan sebesar Rp 3.000.000.000,00.
4. Dukungan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan keprotokolan rapat, pertemuan atau kegiatan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden sebesar Rp 3.000.000.000,00.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017 (Sasaran Program: “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas”)

Sasaran Program Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2017 yaitu **“Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas”** dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu **“Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, Persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, Persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah, Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan dan Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan”**.

Indikator Kinerja Utama yang diukur dengan persentase tingkat kepuasan dilaksanakan melalui survei tingkat kepuasan, yaitu dengan cara menyampaikan kuesioner kepada responden dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan IKU (Indikator Kinerja Utama). Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama yang diukur dengan persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan dilaksanakan dengan membandingkan jumlah naskah dokumen kepresidenan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan jumlah naskah dokumen kepresidenan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Hasil rata-rata persentase capaian kinerja ini selanjutnya dibandingkan dengan rentang capaian kinerja sehingga diperoleh “kategori capaian kinerja” dan “nilai capaian kinerja”. Adapun rentang capaian kinerja yang dipergunakan mengacu pada Rentang Capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019.

**Tabel 3.1.**  
**Rentang Capaian Kinerja**

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori	Nilai
1	85% - 100%	Sangat Baik	A
2	70% - <85%	Baik	B
3	55% - <70%	Sedang	C
4	<55%	Kurang Baik	D

Realisasi dan capaian dari masing-masing indikator kinerja utama Deputy Bidang Dukungan kerja Kabinet Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2.**  
**Realisasi, Capaian dan Kategori dari Indikator Kinerja Utama**  
**Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	85%	85%	Sangat Baik
2	Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	Sangat Baik
3	Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	81%	81%	Baik
4	Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan	77%	77%	Baik
5	Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	90%	90%	Sangat Baik

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017**

Sasaran Program “**Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas**” dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama pencapaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **Indikator Kinerja Utama 1**

**Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet**

Indikator Kinerja Utama ini untuk mengukur kualitas kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam melaksanakan penyiapan, penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet. Meningkatnya kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap informasi penyelenggaraan sidang kabinet, sarana dan prasarana sidang kabinet yang memadai, penayangan paparan materi sidang kabinet yang berkualitas serta risalah sidang kabinet yang diperoleh dengan cepat merupakan indikator keberhasilan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sidang kabinet. Dengan mengukur tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet ini, diharapkan dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dalam pengelolaan sidang kabinet dan mempertahankan serta meningkatkan kembali kelebihan yang sudah dimiliki dalam pengelolaan sidang kabinet.

Pengukuran persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada Bulan Juni dan Desember dengan responden berjumlah 13 orang peserta sidang kabinet di lingkungan Sekretariat Kabinet yaitu :

1. Sekretaris Kabinet
2. Wakil Sekretaris Kabinet
3. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
4. Deputi Bidang Perekonomian
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Deputi Bidang Kemaritiman
7. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
8. Deputi Bidang Administrasi
9. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan
10. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim
11. Staf Ahli Bidang Komunikasi
12. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
13. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional

Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan masing-masing kegiatan pengelolaan sidang kabinet pada semester I dan Semester II yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata} = \left( \frac{\sum \text{ bobot nilai jawaban per pernyataan}}{n} \right) \times 100\%$$

*Keterangan*

*n* = total jawaban responden per pernyataan

Hasil penghitungan persentase kepuasan responden atas pengelolaan sidang kabinet pada survei semester I dan II tahun 2017, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2017**

No	Ruang Lingkup	Semester I	Semester II	Tahun 2017
1.	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet	85%	88%	86%
2.	Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet	85%	83%	84%
3.	Penayangan Paparan Materi Sidang Kabinet	85%	88%	86%
4.	Risalah Sidang Kabinet	85%	85%	85%
<b>5.</b>	<b>Pengelolaan Sidang Kabinet</b>	<b>85%</b>	<b>86%</b>	<b>85%</b>

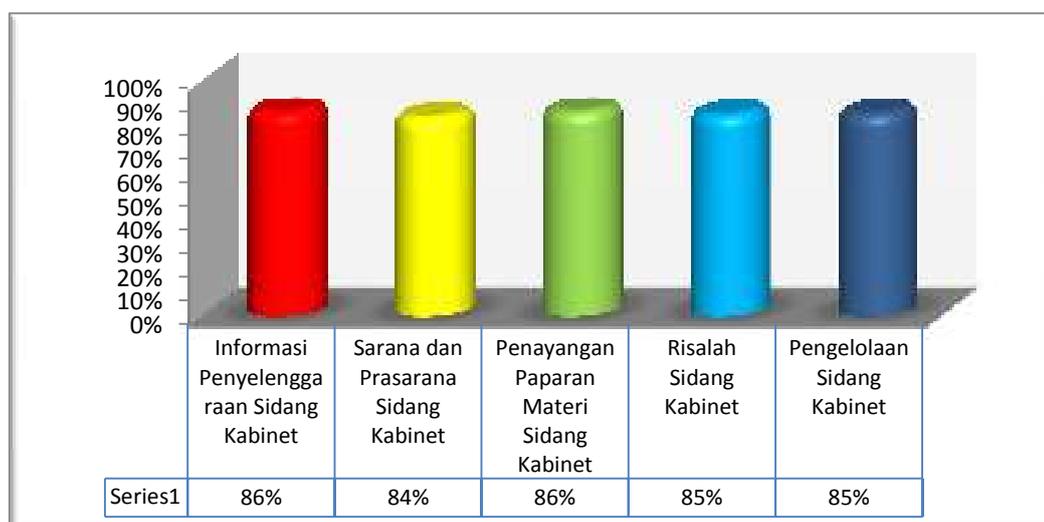
Berdasarkan Tabel 3.3., pada semester I, hasil survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet diperoleh persentase sebesar 85%, hasil tersebut merupakan rerata dari persentase informasi penyelenggaraan sidang kabinet sebesar 85%, sarana dan prasarana sidang kabinet sebesar 85%, penayangan paparan materi sidang kabinet sebesar 85% dan risalah sidang kabinet sebesar 85%. Sementara pada semester II, tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet meningkat yaitu diperoleh persentase sebesar 86%, yang merupakan rerata dari persentase informasi penyelenggaraan sidang kabinet sebesar 88%, sarana dan prasarana sidang kabinet sebesar 83%, penayangan paparan materi sidang kabinet sebesar 88% dan risalah sidang kabinet sebesar 85%.

Merujuk pada tabel diatas, capaian kinerja pengelolaan sidang kabinet semester I dan semester II mengalami perbedaan persentase sebesar 1%. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner oleh responden survei, perbedaan capaian ini disebabkan karena pada semester I, waktu pendistribusian risalah dan penyampaian informasi penyelenggaraan sidang kabinet dianggap kurang cepat sehingga beberapa responden masih merasa kurang puas dengan pengelolaan sidang kabinet.

Pada tahun 2017, capaian kinerja atas pengelolaan sidang kabinet memperoleh hasil sangat baik yaitu sebesar 85%. Persentase ini didapatkan dengan menjumlah rata-rata persentase pengelolaan sidang kabinet setiap semester dibagi dengan total jumlah survei yang dilakukan dalam tahun 2017. Jika disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet secara keseluruhan yaitu sebesar 85% masuk dalam kategori **“Sangat Baik”** atau mencapai nilai **“A”**.

Berdasarkan penjelasan tersebut, persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet pada tahun 2017 dapat digambarkan melalui grafik berikut :

**Grafik 3.1. Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2017**



Pada pelaksanaan survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet tahun 2017 belum memperoleh hasil maksimal, hal ini dikarenakan tingkat pengembalian jawaban kuesioner yang masih belum memenuhi target, dimana pada pelaksanaan survei kepuasan semester I terdapat 5 responden yang tidak mengembalikan kuesioner jawaban dan sejumlah 5 responden pada semester II dari total 13 responden. Beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk penyelenggaraan survei periode berikutnya seperti perpanjangan waktu pelaksanaan survei mengingat responden survei merupakan pejabat Sekretariat Kabinet yang memiliki kesibukan di bidangnya. Penanggung jawab survei juga harus lebih aktif dalam mensosialisasikan tujuan kegiatan survei ini agar responden lebih tanggap dan mempercepat proses pengembalian kuesioner jawaban.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016, pada tahun 2017 indikator kinerja utama terkait dengan penyelenggaraan sidang kabinet dan risalah sidang kabinet mengalami penurunan. Pada tahun 2016 persentase kepuasan penyelenggaraan sidang kabinet yang terdiri dari informasi penyelenggaraan sidang kabinet, sarana dan prasarana sidang kabinet dan penayangan paparan materi sidang kabinet memperoleh persentase sebesar 93,01%. Serta kepuasan terhadap Risalah Sidang Kabinet sebesar 95,74%. Jika dibuat rata-rata untuk memperoleh persentase kepuasan secara keseluruhan atas pengelolaan sidang kabinet tahun 2016 adalah sebesar 94,38%. Sedangkan pada tahun 2017 persentase kepuasan terhadap pengelolaan sidang kabinet hanya sebesar 85%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan peningkatan mutu pelayanan pengelolaan sidang kabinet dengan banyak melakukan inovasi di setiap kegiatan pada pengelolaan sidang kabinet. Pada tahun selanjutnya diharapkan hal ini menjadi fokus utama dari Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet agar turut meningkatkan mutu pelayanan terkait pengelolaan sidang kabinet sehingga dapat tercapai kinerja yang maksimal.

#### **Indikator Kinerja Utama 2**

**Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

Indikator Kinerja Utama ini digunakan untuk mengukur kualitas naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disiapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang sudah selesai berarti naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disiapkan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sudah disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Kabinet berupa :

- a. Pengajuan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Republik Indonesia.
- b. Paraf Sekretaris Kabinet pada naskah Surat Kepresidenan/Kenegaraan yang akan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mohon persetujuan dan tanda tangan Presiden Republik Indonesia.

Pengukuran Indikator Kinerja Utama ini menggunakan formulasi perhitungan :

$$= \left( \frac{\sum \text{Naskah dokumen kepresidenan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\sum \text{Naskah dokumen kepresidenan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \right) \times 100\%$$

Hasil perhitungan penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan pada survei semester I dan II tahun 2017, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet Tahun 2017**

No	Ruang Lingkup	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun 2017
1.	Jumlah Naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disiapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	120 naskah dan dokumen	156 naskah dan dokumen	155 naskah dan dokumen	119 naskah dan dokumen	550 naskah dan dokumen
2.	Jumlah Naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	120 naskah dan dokumen	156 naskah dan dokumen	155 naskah dan dokumen	119 naskah dan dokumen	550 naskah dan dokumen
3.	<b>Persentase Penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

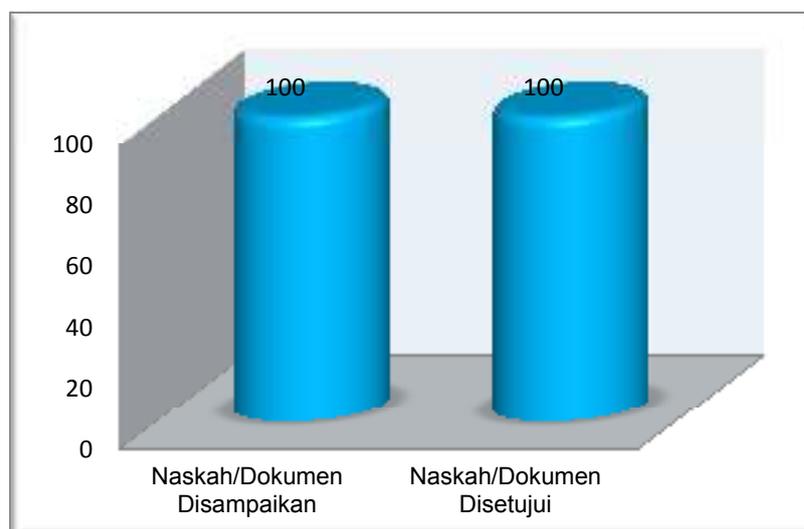
Berdasarkan Tabel 3.4., persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan pada tahun 2017 diperoleh persentase sebesar 100%, hasil tersebut merupakan rerata dari persentase penyelesaian pada triwulan I hingga triwulan IV tahun 2017. Pada triwulan I, dari 120 naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang terdiri dari 40 naskah kepresidenan dan 80 dokumen terjemahan yang disiapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, seluruh naskah dan dokumen tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan persentase penyelesaian sebesar 100%. Pada triwulan II, dari 156 naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang terdiri dari 34 naskah kepresidenan dan 122 dokumen terjemahan yang disiapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, seluruh naskah dan dokumen tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan persentase penyelesaian sebesar 100%. Pada triwulan III, dari 155 naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang terdiri dari 37 naskah kepresidenan dan 118 dokumen terjemahan yang disiapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, seluruh

naskah dan dokumen tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan persentase penyelesaian sebesar 100%. Serta pada triwulan IV, dari 119 naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang terdiri dari 39 naskah kepresidenan dan 80 dokumen terjemahan yang disiapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, seluruh naskah dan dokumen tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan persentase penyelesaian sebesar 100%.

Merujuk pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa dari triwulan I hingga triwulan IV, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sudah mampu menyelesaikan seluruh naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disiapkan. Sehingga pada tahun 2017, capaian kinerja atas penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan memperoleh hasil sangat baik yaitu sebesar 100%. Persentase ini didapatkan dengan menjumlah rata-rata persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan setiap triwulan dibagi dengan total jumlah periode triwulan dalam tahun 2017. Jika disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas kepuasan penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet secara keseluruhan yaitu sebesar 100% dan masuk dalam kategori **“Sangat Baik”** atau mencapai nilai **“A”**.

Berdasarkan penjelasan tersebut, persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet pada tahun 2017 dapat digambarkan melalui grafik berikut :

**Grafik 3.2.**  
**Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Tahun 2017**



Baik pada tahun 2016 maupun pada tahun 2017, seluruh naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%. Perbedaan pada tahun 2016 dan 2017 hanya terletak pada

jumlah naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang dikelola oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Pada tahun 2016, jumlah naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan adalah sebanyak 237 naskah dan dokumen, sedangkan pada tahun 2017, jumlahnya sebanyak 550 naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan. Peningkatan jumlah naskah dan dokumen tidak mempengaruhi capaian persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan di tahun 2017.

### **Indikator Kinerja Utama 3**

#### **Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah**

Indikator Kinerja Utama ini untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam memberikan pembinaan kepada peserta Diklat Fungsional Penerjemah Tingkat Ahli Pertama dari berbagai instansi pusat dan daerah. Meningkatnya kepuasan peserta diklat terhadap materi diklat, pengajar diklat, manfaat yang diperoleh dari diklat, fasilitas penunjang diklat dan layanan penyelenggara diklat yang baik merupakan indikator keberhasilan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam memberikan pembinaan kepada peserta Diklat Fungsional Penerjemah. Dengan mengukur tingkat kepuasan peserta Diklat Fungsional Penerjemah ini, diharapkan dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dalam pembinaan peserta diklat dan mempertahankan serta meningkatkan kembali kelebihan yang sudah dimiliki dalam pembinaan peserta diklat.

Pengukuran persentase kepuasan peserta Diklat Fungsional Penerjemah menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan pada saat penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah Tingkat Ahli Pertama dengan responden peserta diklat.

Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan masing-masing layanan diklat yang diberikan pada periode yang telah ditentukan yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata} = \left( \frac{\sum \text{ bobot nilai jawaban per pernyataan}}{n} \right) \times 100\%$$

*Keterangan*

*n = total jawaban responden per pernyataan*

Hasil penghitungan persentase kepuasan responden atas diklat fungsional penerjemah pada tahun 2017, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

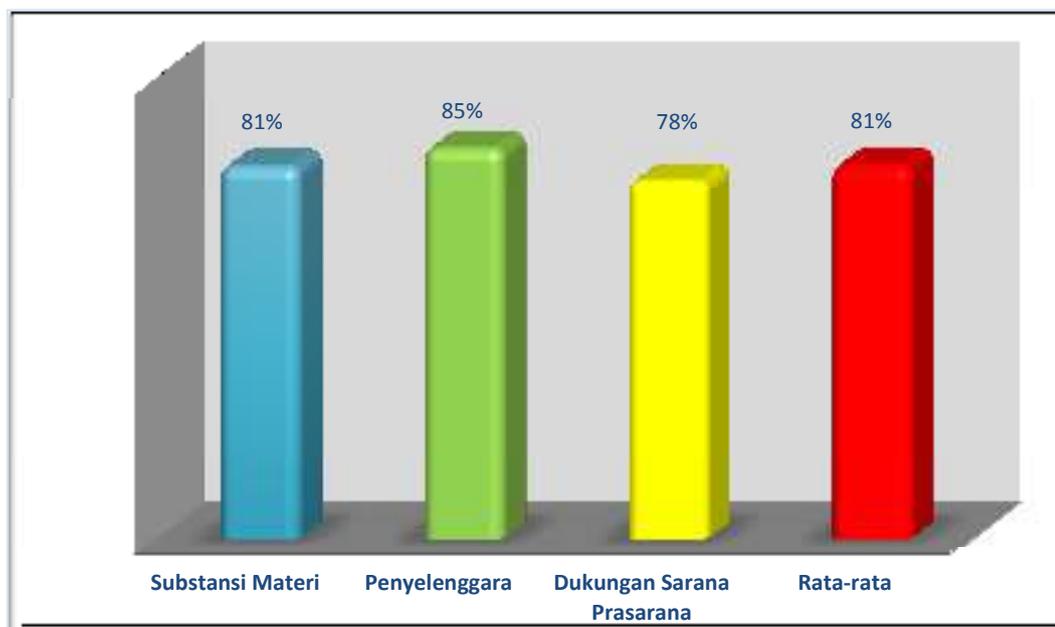
**Tabel 3.5.**  
**Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah**  
**Tahun 2017**

No	Ruang Lingkup	Tahun 2017
1.	Materi Diklat	81%
2.	Penyelenggara	85%
3.	Sarana dan Prasarana	78%
4.	Diklat Fungsional Penerjemah	<b>81%</b>

Berdasarkan Tabel 3.5., pada tahun 2017 capaian kinerja atas layanan dalam penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah memperoleh hasil yang baik yaitu sebesar 81%. Persentase ini diperoleh dengan menjumlah rata-rata persentase setiap layanan Diklat Fungsional Penerjemah dibagi dengan total jumlah layanan yang dilakukan dalam tahun 2017. Jika disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas kepuasan peserta diklat terhadap Diklat Fungsional Penerjemah secara keseluruhan yaitu sebesar 81% masuk dalam kategori **“Baik”** atau mencapai nilai **“B”**.

Berdasarkan penjelasan tersebut, persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet pada tahun 2017 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut :

**Grafik 3.3.**  
**Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah**  
**Tahun 2017**



Persentase kepuasan peserta Diklat Fungsional Penerjemah ini merupakan indikator kinerja utama Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang baru ada di tahun 2017, dan survei untuk melakukan pengukuran pada penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah baru dilakukan di tahun 2017 sehingga masih belum bisa dibandingkan dengan penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah di tahun 2016. Survei pengukuran kepuasan peserta Diklat Fungsional Penerjemah dilaksanakan oleh 30 peserta diklat Fungsional Penerjemah Tingkat Ahli Pertama sebagai responden yang dilakukan 1 (satu) kali selama tahun 2017. Hasil Persentase paling kecil terdapat pada layanan diklat dukungan sarana dan prasarana yaitu sebesar 78%.

Hal ini dikarenakan terdapat 17 responden yang kurang puas terhadap sarana dan prasarana diklat yang disediakan penyelenggara. Hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Diklat Fungsional Penerjemah selanjutnya agar sarana dan prasarana yang memadai menjadi fokus utama untuk dilakukan perbaikan dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Penerjemah.

#### **Indikator Kinerja Utama 4**

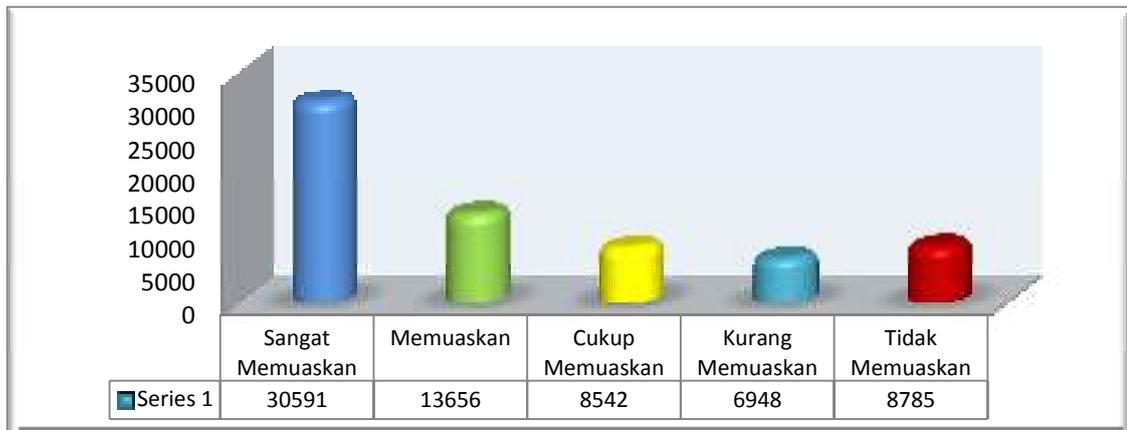
#### **Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan**

Indikator Kinerja Utama ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet berupa berita, artikel, transkripsi, video dan/atau foto melalui situs resmi Sekretariat Kabinet [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id). Dengan mengukur tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan ini, diharapkan dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dalam penyediaan informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet dan mempertahankan serta meningkatkan kembali kelebihan yang sudah dimiliki dalam penyebarluasan informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Pengukuran persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Responden survei adalah pengakses informasi pada laman resmi Sekretariat Kabinet. Jawaban survei akan dihimpun dan diakumulasikan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada Bulan Juni dan Desember. Pengukuran hasil survei untuk memperoleh persentase dengan kategori puas dilakukan dengan menghitung rata-rata jumlah responden yang memilih kategori puas yaitu sangat memuaskan, memuaskan dan cukup memuaskan dibagi dengan jumlah responden dikali 100% serta untuk memperoleh persentase dengan kategori tidak puas dilakukan dengan menghitung rata-rata jumlah responden yang memilih kategori tidak puas yaitu kurang memuaskan dan tidak memuaskan dibagi dengan jumlah responden dikali 100%.

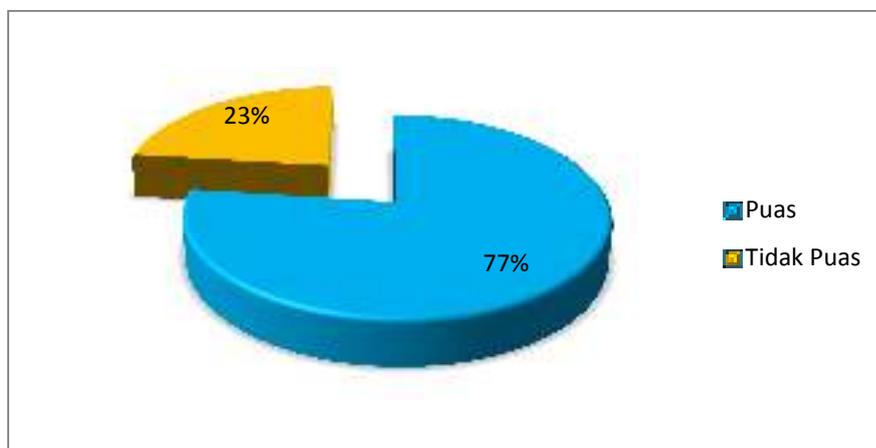
Jumlah responden dari pengukuran kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 3.4.**  
**Jumlah Responden Survei Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan Tahun 2017 (per responden)**



Hasil penghitungan persentase kepuasan responden terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan pada tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 3.5.**  
**Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan Tahun 2017**



Berdasarkan Grafik 3.5., pada Tahun 2017, capaian kinerja atas penyediaan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan memperoleh hasil yang baik yaitu sebesar 77%. Jika disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan yaitu sebesar 77% masuk dalam kategori “**Baik**” atau mencapai nilai “**B**”.

Pada pelaksanaan survei kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan tahun 2017 belum memperoleh hasil maksimal, hal ini dikarenakan dari total 3.804.650

*viewer* laman *www.setkab.go.id* hanya 68.522 *viewer* yang melakukan survei. Hal yang bisa dipertimbangkan untuk menarik minat *viewer* dalam melakukan survei adalah dengan membuat laman survei menjadi lebih menarik dari sebelumnya atau pemberian *reward* bagi *viewer* yang melakukan survei.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, pada tahun 2017 kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet mengalami penurunan yang sangat signifikan dari sisi jumlah responden. Pada tahun 2016 jumlah masyarakat luas yang menjadi responden survei laman website Sekretariat Kabinet adalah sebanyak 277.679 responden, sedangkan pada tahun 2017 hanya sebanyak 68.522 responden. Pada tahun 2016 persentase kepuasan informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet sebesar 82,69% sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 77% sehingga dari sisi persentase kepuasan juga mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 5,69%.

### Indikator Kinerja Utama 5

#### Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan

Indikator Kinerja Utama ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet. Meningkatnya kepuasan terhadap layanan ruang tunggu yang memadai, pelayanan yang baik dan fasilitas yang memadai merupakan indikator keberhasilan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam meningkatkan kualitas layanan keprotokolan. Dengan mengukur tingkat kepuasan layanan keprotokolan ini, diharapkan dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dalam penyediaan layanan keprotokolan dan mempertahankan serta meningkatkan kembali kelebihan yang sudah dimiliki dalam penyediaan layanan keprotokolan.

Pengukuran persentase kepuasan layanan keprotokolan menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Responden adalah peserta rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Perwakilan Negara Sahabat, Perwakilan Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, dan lain-lain. Jawaban kuesioner akan dihimpun dan diakumulasi setiap 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan masing-masing kegiatan layanan keprotokolan pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata} = \left( \frac{\sum \text{ bobot nilai jawaban per pernyataan}}{n} \right) \times 100\%$$

*Keterangan*

*n* = total jawaban responden per pernyataan

Hasil penghitungan persentase kepuasan responden atas layanan keprotokolan pada survei triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2017, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.6.**  
**Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan**  
**Tahun 2017**

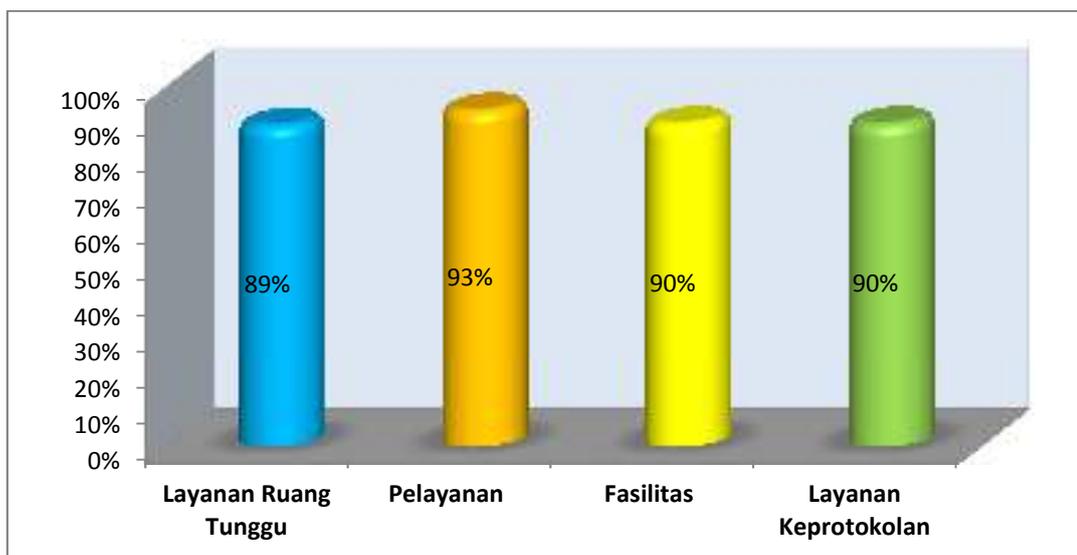
No	Ruang Lingkup	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun 2017
1.	Layanan Ruang Tunggu	92%	90%	92%	84%	89%
2.	Pelayanan	96%	95%	96%	86%	93%
3.	Fasilitas	92%	87%	94%	86%	90%
4.	Layanan Keprotokolan	93%	91%	94%	85%	90%

Berdasarkan Tabel 3.6., pada triwulan I, hasil survei kepuasan layanan keprotokolan diperoleh persentase sebesar 93%, hasil tersebut merupakan rerata dari persentase layanan ruang tunggu sebesar 92%, pelayanan keprotokolan sebesar 96% dan fasilitas layanan keprotokolan sebesar 92%. Pada triwulan II, hasil survei kepuasan layanan keprotokolan diperoleh persentase sebesar 91%, hasil tersebut merupakan rerata dari persentase layanan ruang tunggu sebesar 95%, pelayanan keprotokolan sebesar 95% dan fasilitas layanan keprotokolan sebesar 87%. Pada triwulan III, hasil survei kepuasan layanan keprotokolan diperoleh persentase sebesar 94%, hasil tersebut merupakan rerata dari persentase layanan ruang tunggu sebesar 92%, pelayanan keprotokolan sebesar 96% dan fasilitas layanan keprotokolan sebesar 94%. Sementara pada triwulan IV, hasil survei kepuasan layanan keprotokolan diperoleh persentase sebesar 85%, hasil tersebut merupakan rerata dari persentase layanan ruang tunggu sebesar 84%, pelayanan keprotokolan sebesar 86% dan fasilitas layanan keprotokolan sebesar 86%.

Pada tahun 2017, capaian kinerja atas layanan keprotokolan memperoleh hasil sangat baik yaitu sebesar 90%. Persentase ini didapatkan dengan menjumlah rata-rata persentase kepuasan layanan keprotokolan setiap triwulan dibagi dengan total jumlah survei yang dilakukan dalam tahun 2017. Jika disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas kepuasan terhadap layanan keprotokolan secara keseluruhan yaitu sebesar 90% masuk dalam kategori **“Sangat Baik”** atau mencapai nilai **“A”**.

Berdasarkan penjelasan tersebut, persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan pada tahun 2017 dapat digambarkan melalui grafik berikut :

**Grafik 3.6.**  
**Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan**  
**Tahun 2017**



Jika dibandingkan dengan tahun 2016, persentase kepuasan terkait layanan keprotokolan mengalami penurunan. Pada tahun 2016 persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan adalah sebesar 98,67% sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 90% sehingga mengalami penurunan sebesar 8,67%. Diharapkan layanan keprotokolan semakin meningkatkan kualitas layanannya sehingga dapat memuaskan baik peserta maupun Sekretariat Kabinet.

### **C. Realisasi Anggaran**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2017, kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tidak hanya diukur dari terlaksananya sasaran program dan indikator kinerja utama yang ditetapkan, melainkan juga dari penggunaan anggaran yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan evaluasi anggaran secara berkala, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet merasakan perlu melakukan revisi anggaran karena semakin banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Hasil revisi anggaran dan realisasi anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2017 dapat tergambarkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7.**  
**Rincian Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet**  
**Tahun 2017**

Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Deputi Dukungan Kerja Kabinet	12.000.000.000	14.329.061.000	13.696.058.544	633.002.456

Berdasarkan tabel 3.7., terlihat bahwa anggaran pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2017 sebesar Rp 14.329.061.000,- (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) terserap sebesar Rp 13.696.058.544,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 95,60% dengan kategori “**Sangat Baik**”.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pencapaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara keseluruhan memiliki tujuan untuk turut serta dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran program dari Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada khususnya dan Sekretariat Kabinet pada umumnya. Pencapaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat dilihat pada setiap indikator kinerja utama yang dimiliki.

Pada indikator kinerja utama yang pertama yaitu kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet diperoleh persentase sebesar 85% dan masuk kedalam kategori “Sangat Baik” atau mencapai nilai “A” sesuai dengan rentang capaian kinerja pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2015–2019. Pada indikator kinerja utama yang kedua yaitu kepuasan penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet diperoleh persentase sebesar 100% dan masuk kedalam kategori “Sangat Baik” dan mencapai nilai “A”. Pada indikator kinerja utama yang ketiga yaitu kepuasan peserta diklat terhadap Diklat Fungsional Penerjemah diperoleh persentase sebesar 81% dan masuk kedalam kategori “Baik” dan mencapai nilai “B”. Pada indikator kinerja utama yang keempat yaitu kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan diperoleh persentase sebesar 77% dan masuk kedalam kategori “Baik” dan mencapai nilai “B”. Serta pada indikator kinerja utama yang kelima yaitu kepuasan terhadap layanan keprotokolan diperoleh persentase sebesar 90% dan masuk kedalam kategori “Sangat Baik” dan mencapai nilai “A”.

Tidak semua Indikator Utama Kinerja tahun 2017 dapat dibandingkan capaian kinerjanya dengan capaian kinerja tahun 2016. Indikator Kinerja Utama 3 (tiga) yaitu persentase kepuasan peserta Diklat Fungsional Penerjemah merupakan Indikator Kinerja Utama baru di tahun 2017 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2016. Sedangkan Indikator Kinerja Utama lainnya yaitu persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan Sidang Kabinet, persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, persentase kepuasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan dan persentase kepuasan layanan keprotokolan dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, capaian kinerja dari tiga Indikator Kinerja Utama mengalami penurunan yang cukup signifikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet**  
**Tahun 2016 dan 2017**

Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2016	Capaian Kinerja 2017	Selisih	Keterangan
Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	94,38%	85%	9,38%	Mengalami penurunan
Persentase Kepuasan Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan	82,69%	77%	5,69%	Mengalami penurunan
Persentase Kepuasan Layanan Keprotokolan	98,67%	90%	8,67%	Mengalami penurunan

Meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala yang ditemui dari setiap kegiatan yang dilakukan. Namun, secara keseluruhan pencapaian kinerja tersebut membuktikan bahwa pada Tahun 2017 Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sudah mencapai keberhasilan kinerja baik dalam terlaksananya seluruh kegiatan maupun dalam penggunaan anggaran yang telah ditetapkan terbukti dengan diperolehnya kategori “Baik” dan “Sangat Baik” pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Sehingga Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sudah mampu mewujudkan terlaksananya sasaran program “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas”.

## **B. Saran**

Pencapaian kinerja yang baik akan selalu diikuti dengan tuntutan agar menjadi lebih baik. Dalam rangka meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya berikut ini beberapa saran dan rekomendasi bagi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet :

1. Melakukan inovasi-inovasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet baik dalam pengelolaan sidang kabinet, penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan, penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah, penyediaan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan, dan layanan keprotokolan.
2. Meningkatkan kerja sama dengan merekatkan koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan setiap kegiatan baik di lingkungan internal Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet maupun di lingkungan eksternal yaitu antara Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dengan Deputi substansi lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun dengan Kementerian dan Lembaga lain.